



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH
15-19 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 ke Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Pangan dan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun dasar hukum melakukan Kunjungan Kerja Reses ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan lapangan dan berdiskusi dengan *stakeholder* terkait dengan permasalahan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Meninjau dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan Taman Nasional Gunung Leuser;
3. Melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan *stakeholder* terkait dengan Ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser; serta
4. Melakukan peninjauan lapangan di Kawasan komoditas pangan Kabupaten Aceh Tenggara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meliputi sektor Pangan dan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Aceh Tenggara.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 ke Provinsi Aceh dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, dilaksanakan pada tanggal 15-19 Juli 2024. Adapun lokasi yang dikunjungi antara lain:

1. Balai Benih Ikan Lawe Bekung di Kabupaten Aceh Tenggara di Jl.Pante Barat, Desa Lawe Bekung, Kec. Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
2. Stasiun Penelitian BBTNGL di Jl. Blangkejeren-Kutacane No.32, Ketambe, Kec. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh;
3. OPPROOM SETDAKAB Aceh Tenggara, Aceh; serta
4. Kecamatan Babul Makmur

II. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang dikelilingi dengan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan dengan ketinggian 25-1.000 mdpl. Secara astronomis, Kabupaten

Aceh Tenggara terletak 3055'23"- 4016'37" Lintang Utara dan 96043'23"- 98010'32" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan:

Sebelah Utara	Kabupaten Gayo Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Selatan	Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Barat	Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 4.242,04 km² serta terdiri dari 16 kecamatan, 51 pemukiman dan 385 desa. Adapun kecamatan Darul Hasanah merupakan kecamatan terbesar yaitu dengan luas sebesar 1.346,72 km². Sementara Kecamatan Babussalam merupakan kecamatan terkecil dengan luas sebesar 9,48 km².

Apabila dilihat dari kondisi lahan, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki bentuk wilayah yang beragam, mulai dari lembah/datar sampai bergunung. Adapun sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tenggara didominasi wilayah lembah/datar. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki klasifikasi kemiringan lereng yang terbagi atas kelas kelerengannya yaitu: <8%, 8-15%, 16-25%, 26-40% dan >40%. Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini didominasi oleh lahan berkelereng 16-25% dengan luasan mencapai 177. 631, 96 Ha atau sebesar 41,87% dari total luas wilayah kabupaten. Bentang alam Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk oleh Dataran Tinggi Alas yang relatif sempit dengan arah tenggara-barat laut yang diapit oleh rangkaian pegunungan Bukit Barisan di sisi timur dan sisi barat dataran tinggi tersebut. Beberapa puncak di rangkaian pegunungan di sisi barat dataran tinggi Alas antara lain adalah Bukit Kemiri (3.314 m), sedangkan di sisi timur berupa Gunung Bandahara (3.010 m) dan Bukit Apul Relem (3.374 m). Apabila bentang alam rangkaian pegunungan yang mengapit dataran tinggi tersebut didelineasi berdasarkan kemiringan

lereng, maka wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu:

1. Kelas kemiringan 0-8%
2. Kelas kemiringan 8-15%
3. Kelas kemiringan 15-40%
4. Kelas kemiringan > 40%

Wilayah datar dengan kelas kemiringan 0-8% tersebar di wilayah Kutacane dan Babel. Adapun kelas kemiringan 8-15% ditandai dengan daerah yang bergelombang sampai agak berbukit dan tersebar di pinggir Lembah Alas bagian selatan Kabupaten Aceh Tenggara. Wilayah agak berbukit sampai berbukit dengan kemiringan 15 – 40 % tersebar merata di Kabupaten Aceh Tenggara, terutama di wilayah Kecamatan Badar dan di sebelah selatan Kecamatan Lawe Alas. Sementara itu, wilayah dengan kelas kemiringan lebih dari 40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditandai dengan daerah yang berbukit sampai bergunung.

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 2 karakteristik kawasan yaitu kawasan dataran dan kawasan pegunungan. Dua karakteristik topologi kawasan ini mengindikasikan adanya 2 kegiatan budidaya utama yaitu wilayah dataran yang memberikan peluang sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan berupa padi, palawija, tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias juga berpeluang dikembangkan untuk sektor peternakan dan perikanan darat. Wilayah pedalaman yang memiliki topografi berbukit diprioritaskan pengembangannya sebagai kawasan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

B. Sektor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara

Perikanan budi daya merupakan kegiatan membesarkan ikan untuk tujuan konsumsi. Berdasarkan data global FAO sejak Tahun 1950, industri perikanan budidaya memiliki output 500 ribu ton per tahun, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan industri perikanan tangkap yang saat itu sudah mencapai 20 juta ton pertahun. Tahun 2015, produksi industri perikanan budidaya didominasi oleh benua Asia dengan total produksi \pm 81 juta ton. Indonesia menjadi negara ketiga produsen terbesar di Asia Tenggara dengan total produksi \pm 4,3 juta ton.

Komoditas ikan air tawar yang banyak dibudidaya di Indonesia mencakup ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan bawal, dan ikan gurame, sedangkan komoditas ikan air laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah ikan kerapu bebek/tikus, ikan kerapu macan, ikan kakap putih, ikan kakap merah, ikan baronang, ikan bawal bintang, ikan bandeng, dan ikan tuna sirip kuning. Industri perikanan budidaya di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus dalam mengejar produksi perikanan budidaya hingga 24,85 juta ton. Fokus yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi lima komoditas unggulan ekspor yaitu udang, lobster, kepiting, nila salin, dan rumput laut. Peningkatan produksi dilakukan melalui strategi pembangunan modeling budidaya berbasis kawasan di sejumlah daerah dan bersinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi budidaya perikanan, dan perguruan tinggi.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas 4.242,04 km² terdiri dari 16 kecamatan. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kolam budidaya ikan yang terbesar di tiga kecamatan sentra utama produksi perikanan budaya yaitu kecamatan Lawe bulan, kecamatan deleng Pokhkisen dan kecamatan darul Hasanah dengan komoditas utama ikan mas dan ikan nila total produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah 2.434 ton.

Balai Benih Ikan Lawe Bekung Kabupaten Aceh Tenggara bertugas dan bertanggungjawab dalam mengakomodir dan mengembangkan sektor perikanan baik perikanan budidaya pengolahan hasil perikanan dan penangkapan di perairan umum darat. Sektor perikanan budidaya merupakan ujung tombak yang terus dilakukan pembinaan dan penyuluhan baik dari

regulasi dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun keluar daerah.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, Dinas perikanan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana budaya perikanan, penyediaan benih dan calon induk ikan unggul, serta pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dan peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan. Dalam proses penyediaan benih dan calon induk ikan unggul, Balai Benih Ikan BBI (Balai Benih Ikan) atau sering disebut dengan BBI Lawe bekung, membagikan hasil produksinya kepada unit pembenihan rakyat (UPR) dan kelompok pembudidayaan ikan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara.

Balai benih ikan (BBI) Balai Benih Ikan Lawe bekung merupakan penyedia benih ikan unggul dan calon induk ikan yang berkualitas dan bermutu. BBI (Balai Benih Ikan) juga berperan dalam hal pembinaan unit pembenihan rakyat (UPR) yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dan bekerjasama dengan universitas dan SMK perikanan yang ada di provinsi Aceh sebagai sarana edukasi, pelatihan, magang dan penelitian.

C. Sektor Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara, terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, memiliki sektor kehutanan yang signifikan dalam perekonomian lokal. Sektor ini, bersama dengan pertanian dan perikanan, berfungsi sebagai basis ekonomi daerah. Meskipun sektor kehutanan di Aceh Tenggara tidak sebesar di provinsi lainnya, ia tetap memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Kehutanan di Aceh Tenggara dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, serta pelaksanaan program-program perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah VI juga berperan dalam pengelolaan hutan di daerah ini, termasuk pemetaan hutan dan pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.

Menurut analisis yang dilakukan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Aceh Tenggara menunjukkan kontribusi yang bervariasi terhadap perekonomian. Data menunjukkan bahwa nilai Location Quotient (LQ) untuk sektor ini mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi mencapai 43,19 pada tahun 2014 dan terendah 40,66 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor kehutanan ada, kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi.

Sektor kehutanan di Aceh Tenggara menghadapi beberapa tantangan, termasuk penegakan hukum kehutanan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian kebakaran hutan. Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan hutan menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait. Secara keseluruhan, sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki potensi yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung perekonomian lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.

D. Sektor Pangan dan Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara

Pertanian sebagai bagian dari perekonomian Nasional memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Secara khusus, berbagai komoditas pertanian yang ada dan dihasilkan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peluang dalam sektor pertanian dan memberikan kontribusinya pada PDRB Kabupaten Aceh Tenggara. Komoditas jagung merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2022 jumlah produksi jagung di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 170.974 ton. Hasil produksi tersebut berasal dari lahan panen seluas 24.592 Ha dengan produktivitas 6,9 ton per Ha. Namun, jumlah produksi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah produksi sebesar 210.633 ton dari luas panen 30.511 Ha dengan produktivitas 6,9 ton per Ha. Disamping itu, produk unggulan lainnya adalah padi. Tahun 2022 produksi padi mencapai 92.030 ton dari luas panen 13.862 Ha dengan produktivitas 6,7 ton per Ha. Produksi juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana jumlah produksi mencapai 93.864 ton dari luas lahan sawah 8,778 hektare dan luas panen 14.028 hektare dengan produktivitas 6,69 ton per hektare.

Penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Tenggara juga mengalami permasalahan. Tahun lalu, Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dan KP3 untuk serius mengatasi permasalahan pupuk subsidi. Hal tersebut disebabkan oleh harga pupuk subsidi masih dijual diatas HET di Aceh Tenggara. Sementara Pemerintah Kabupaten dan KP3 telah melakukan sidak lapangan terkait dengan persoalan pupuk subsidi dan ditemukan beberapa kios yang tidak memenuhi standar sehingga petani dirugikan atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pada Masa Persidangan V Tahun 2023-2024, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh untuk mengetahui dan meninjau lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

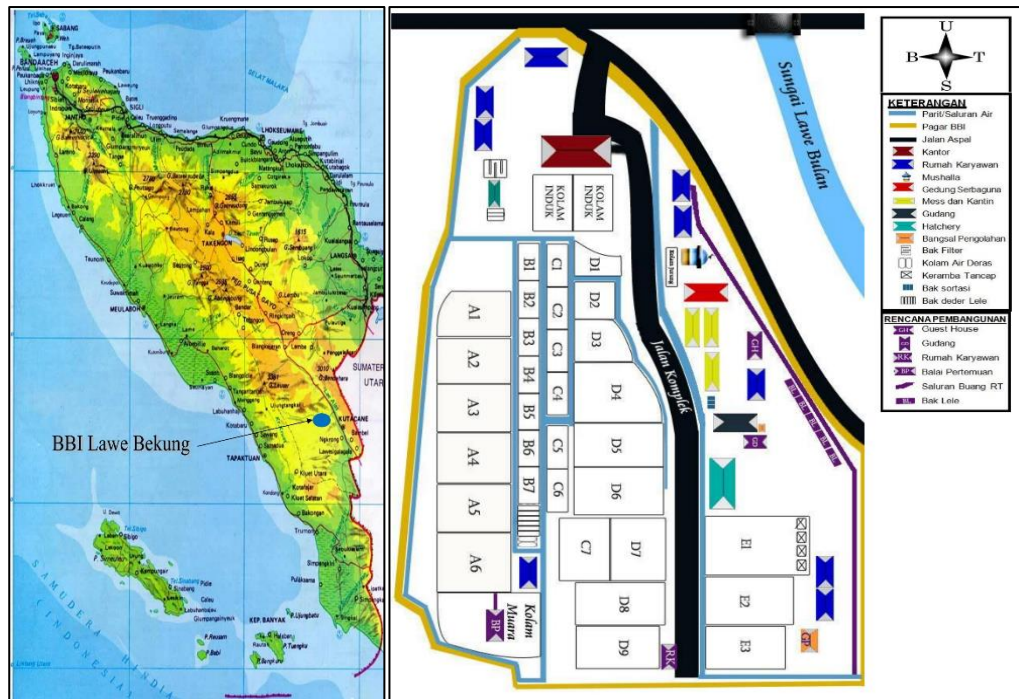
III. HASIL KUNJUNGAN

A. Balai Benih Ikan, Lawe Bekung Kabupaten Aceh Tenggara

1. Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

Kegiatan usaha pembenihan ikan mas di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu kegiatan budidaya yang diwariskan secara turun-temurun. Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Aceh Tenggara yang terletak di Desa Lawe Bekung, Kecamatan Badar, adalah salah satu tempat pembenihan ikan yang bertujuan untuk menghasilkan benih ikan berkualitas, yang kemudian dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dan sekitarnya. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang lapangan kerja.

BBI ini menyediakan berbagai jenis benih ikan air tawar, antara lain ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), ikan Lele (*Clarias batracus*), ikan Mas (*Cyprinus carpio*), ikan Tawes (*Barbonymus gonionotus*), ikan Nilem (*Osteochilus vittatus*), ikan Gurame (*Osphronemus goramy*), ikan Patin (*Pangasius pangasius*), dan ikan Jurung. Ukuran dari masing-masing benih ikan juga bervariasi.



Gambar Peta Provinsi Aceh dan letak BBI Lawe Bekung (kiri), Denah Tata Letak BBI Lawe Bekung (kanan)

1. Lokasi dan Luas area Balai Benih Ikan (BBI) Lawe Bekung
Desa Lawe Bekung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. BBI ini memiliki area pembenihan yang cukup luas, mencakup berbagai kolam dengan total luas rata-rata mencapai 7.317 m². Area ini memungkinkan BBI untuk memproduksi benih dalam jumlah besar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
2. Tujuan dan Fungsi
Balai Benih Ikan (BBI) Lawe Bekung didirikan dengan tujuan utama untuk memproduksi benih ikan berkualitas, yang kemudian dibudidayakan oleh masyarakat setempat. BBI ini memainkan peran penting dalam mendukung sektor perikanan di Aceh Tenggara, khususnya dalam hal pembenihan ikan air tawar. Fasilitas ini dirancang untuk membantu petani ikan lokal dengan menyediakan benih ikan yang unggul sehingga dapat meningkatkan hasil budidaya mereka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dampak Ekonomi, Pengelolaan dan Dukungan
BBI Lawe Bekung dikelola oleh pemerintah daerah, dengan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk dinas perikanan dan lembaga

penelitian, yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas produksi benih ikan.

4. Visi dan Misi

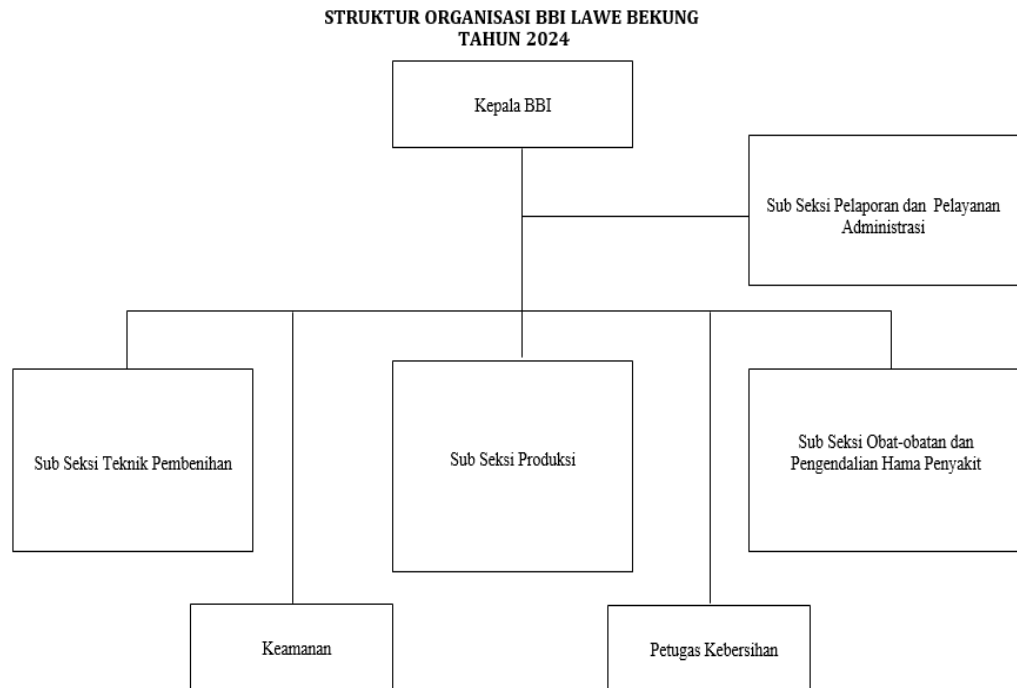
Visi: Menjadi pusat pembenihan ikan air tawar terkemuka di Aceh Tenggara, yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui produksi benih berkualitas.

Misi:

- Menghasilkan benih ikan yang bermutu tinggi untuk mendukung kegiatan budidaya masyarakat.
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani ikan melalui pelatihan dan penyuluhan.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perikanan.

Balai Benih Ikan Lawe Bekung merupakan salah satu upaya penting pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

5. Struktur Organisasi



2. Aspirasi Kelompok Pembudi Daya Ikan Kabupaten Aceh Tenggara

- a. Potensi sumberdaya air dan lahan serta SDM sampai dengan saat ini masih mendukung sehingga berpeluang untuk dapat ditingkatkan lagi produksi ikan air tawar di Kabupaten Aceh Tenggara;

- b. Kendala dan tantangan yang dihadapi diantaranya : sarana prasarana produksi yang masih terbatas, kapasitas keilmuan kelompok pembudidaya dalam hal budidaya, penanganan penyakit, penanganan pasca panen dan pemasaran;
 - c. Harapan: Bantuan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan produksi, calon induk dan benih ikan unggulan, bantuan jaringan pemasaran, bantuan pakan, dapat dibangun pabrik pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dengan harga yang terjangkau, mudah diperoleh.
3. Aspirasi dan Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara
- a. Sarana prasarana produksi ikan air tawar;
 - b. Pemasaran hasil budidaya ikan oleh kelompok pembudidaya;
 - c. Peningkatan kapasitas dan keilmuan dari para pembudidaya melalui pelatihan;
 - d. Diversifikasi hasil budidaya kelompok pembudidaya ikan.
 - e. Melalui kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBK akan melaksanakan kegiatan pelatihan, dan tambahan dari Kementerian KP terkait pelatihan budidaya yang baik dan bantuan sarana produksi;
 - f. Kelangkaan pakan dapat teratasi dengan adanya bantuan mesin pakan mandiri skala kecil dan mikro bisa didapatkan dari dinas KP Kabupaten Aceh Tenggara, untuk meningkatkan produksi dari pembudi daya.
4. Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- a. Kementerian KP telah mendengar aspirasi dari pemerintah dan masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya akan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan komisi IV DPR RI;
 - b. Kementerian KP memiliki semangat yang sama terkait bantuan yang diharapkan dari kelompok pembudidaya untuk berkomitmen meningkatkan produksi, bantuan ada dua jenis yaitu bantuan aspirasi dan bantuan langsung dari Kementerian KP;
 - c. Bantuan aspirasi berupa, ekskavator, bioflog, benih dan bibit unggul dikomunikasikan dengan anggota DPR RI dari dapil Aceh;

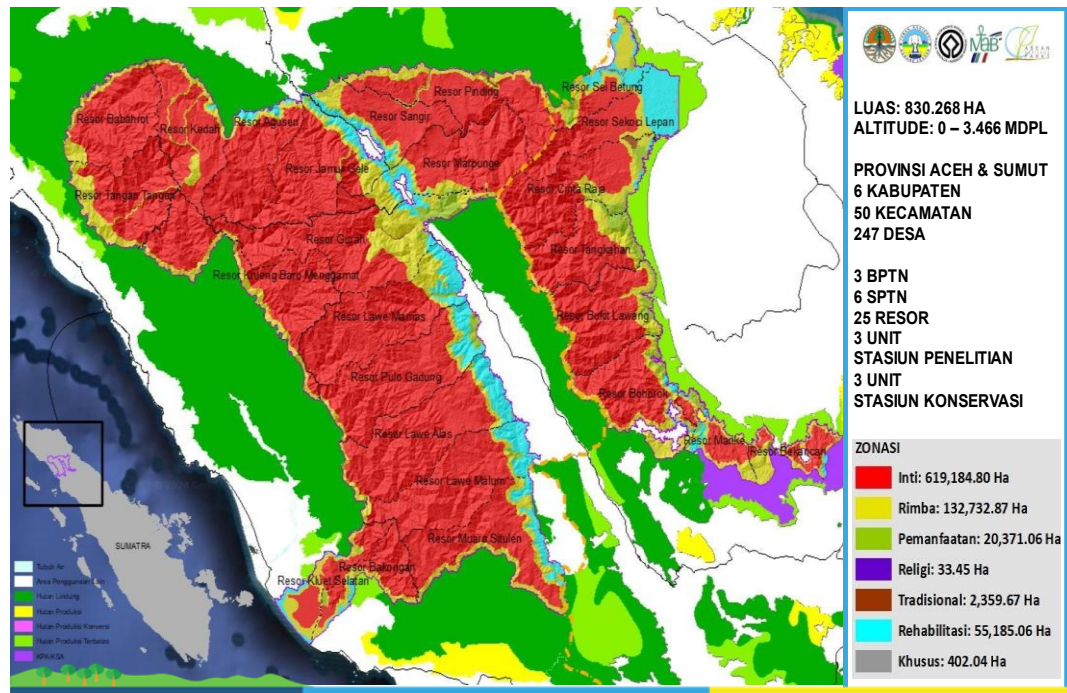
- d. Bantuan indukan dan bibit unggul, Kementerian KP berkomitmen sebelum 17 Agustus 2024 bantuan tersebut telah diterima oleh para pembudidaya, sedangkan pakan masih menjadi kendala pembangunan pabrik pakan di beberapa tempat belum optimal, sehingga solusinya yaitu pembelian pakan melalui pabrik dan supplier swasta dengan jaminan pasokan dan harga yang terjangkau, atau pembelian melalui balai milik Kementerian KP;
 - e. Kementerian KP menyediakan bantuan mesin pembuat pakan skala kecil dan mikro untuk membantu para pembudidaya ikan di Aceh Tenggara.
5. Tanggapan Komisi IV DPR RI
- a. Temuan dan Inovasi membentuk BUMD untuk pemasaran hasil perikanan, namun dibutuhkan konsistensi dari pembudidaya dalam hal produksi, sehingga akan menyulitkan komunikasi dengan pembeli, untuk para pembudidaya agar menjaga stabilitas produksi dengan memperkuat kelembagaan kelompok pembudidaya;
 - b. Peningkatan kapasitas para pembudidaya melalui pelatihan baik dalam hal budidaya maupun dalam pembuatan pakan;
 - c. Meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menganggarkan pelatihan bagi para pembudidaya terutama dalam hal pemasaran;
 - d. Pembudidaya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi;
 - e. Ketersediaan ikan sangat strategis dalam pemenuhan gizi keluarga dan mengatasi krisis pangan. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus mengembangkan balai benih yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sementara bantuan yang diberikan kepada masyarakat/kelompok pembenihan budidaya ikan Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dapat diperbanyak dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekitar.

B. Stasiun Penelitian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

1. Manajemen Taman Nasinal Gunung Leuser



2. Peta Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)

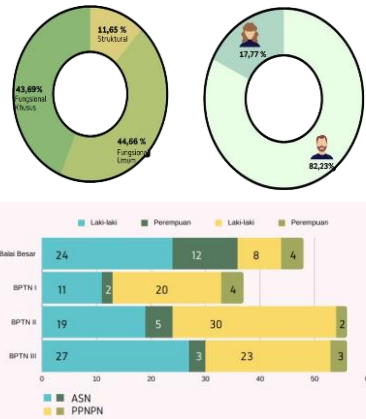


3. Struktur Organisasi TNGL



Statistik Pegawai

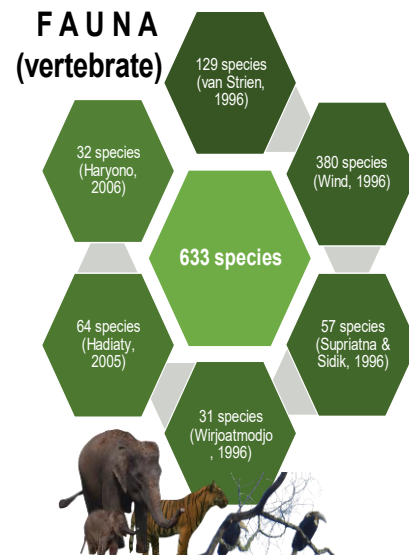
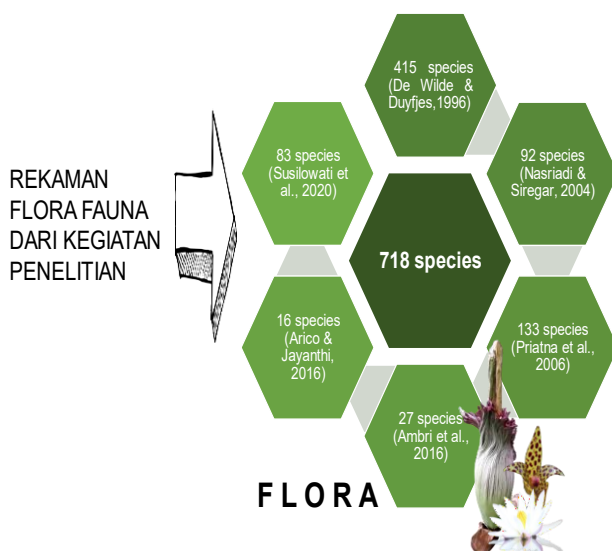
Lokasi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Pegawai (orang)	%
Balai Besar		48	24.37
BPTN Wil. I	143,634.06	37	18.78
BPTN Wil. II	481,279.75	56	28.43
BPTN Wil. III	205,355.14	56	28.43
Total	830,268.95	197	100.00



4. Keaneragaman Hayati TNGL

FLORA FAUNA TNGL

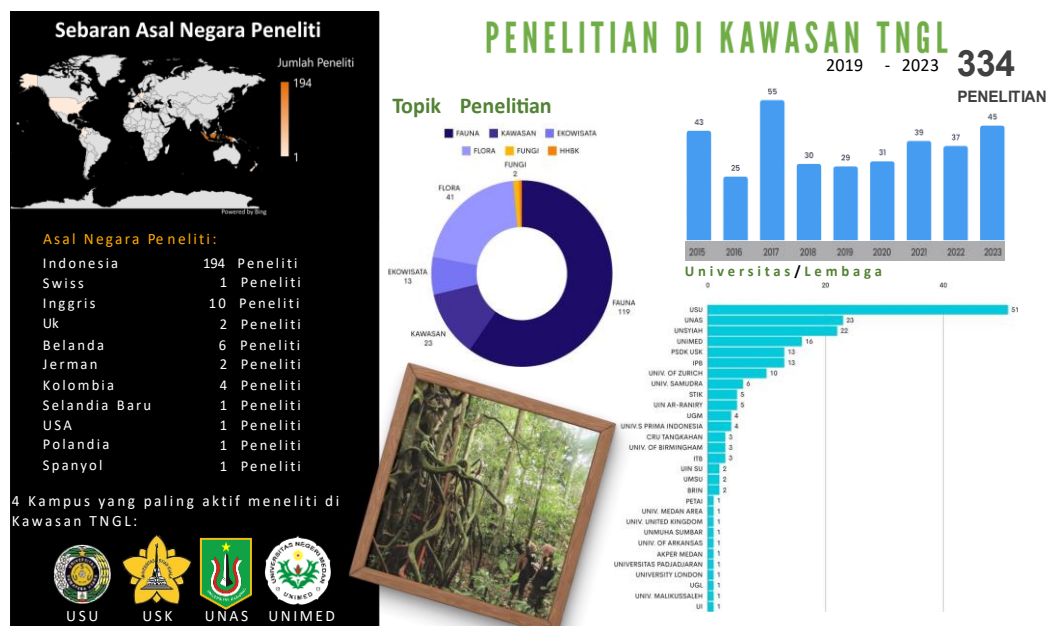
Ditemukan sekitar 4.000 spesies flora, sekitar 380 jenis burung (350 jenis diantaranya hidup menetap), serta sekitar 65% dari 129 spesies mamalia Sumatera



5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di TNGL



6. Pendidikan dan Pelatihan di TNGL



Masyarakat sekitar TNGL sepakat dengan penyelamatan keanekaragaman hayati khususnya di TN Gunung Leuser. Disana terdapat empat satwa kunci yang saling hidup berdampingan. Pada prinsipnya satwa liar ini tidak akan mengganggu manusia jika habitat aslinya tidak dijamah dan diganggu oleh manusia untuk lahan perkebunan (misalnya).

7. Tanggapan KLHK

- a. Informasi Umum:
 - 1) Luas Kawasan TNGL 830.268 Ha – seluas 278.316 Ha di Aceh Tenggara.
 - 2) Luas Kawasan Konservasi yang menjadi kantong gajah dikelola BKSDA Aceh 2 juta Ha dengan populasi gajah 507-601 ekor.
- b. Kantong Gajah di Kab. Aceh Tenggara:
 - 1) Kantong Serakut (Dalam Kawasan TN) – Jumlah Gajah 8 ekor.
 - 2) Kantong Kluet-Trumon-Bengkung-Subulusalam-Sultan Daulat – 54-60 ekor. Dari total tersebut, di Aceh Tenggara (Sembabala) – jumlah Gajah 8 ekor.
- c. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat oleh BBTN GL di Kab. Aceh Tenggara:
 - 1) Jumlah Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Kemitraan Konservasi – 26 KTHK (971 KK) seluas 2.075,8 Ha di 6 Desa dan 4 Kecamatan.
 - 2) Jumlah Penerima Bantuan Ekonomi Produktif (2021-2024) – 29 Kelompok dengan nilai 870 juta Rupiah – dengan jenis bantuan lebah madu, ecoprint, peralatan wisata di 6 Desa dan 4 Kecamatan.
 - 3) Pelibatan Masyarakat Mitra Polhut dalam pengamanan kawasan sebanyak 63 orang tersebar di 8 Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bunbun Indah Kec. Leuser sebanyak 16 orang berupa pelatihan dan peralatan survey dan penanganan konflik.
- e. Pelibatan MMP dan Tim Smart Patrol (di Kab. Aceh Tenggara) oleh BKSDA Aceh untuk pengamanan kawasan sebanyak 11 orang.

8. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI berpendapat bahwa menjaga kelestarian hutan merupakan tanggungjawab bersama karena eksploitasi hutan yang tidak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Komisi IV DPR RI menghimbau dalam menjaga kelestarian hutan khususnya Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dengan

memberikan pemahaman terkait dengan lingkungan hutan. Disamping itu, perlu ada dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perlindungan hutan.

- b. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah Pusat c.q Kementerian LHK agar mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati di Kabupaten Aceh Tenggara. Disamping itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada KLHK untuk membuat FGD terkait dengan peta jalan pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser yang didalamnya memuat proses pengamanan dan pemanfaatan gunung Leuser dengan lebih baik.
- c. Komisi IV DPR RI sepakat dengan KLHK untuk melakukan dan menyusun program pengamanan dan perlindungan Gunung Leuser secara optimal.
- d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk fokus dalam memberikan pendanaan konservasi kepada masyarakat di wilayah Kawasan Hutan.
- e. Revisi UU Konservasi harus mengatur kebijakan fiskal antar daerah penyangga konservasi.

C. Diskusi terkait dengan Ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta penanganan konflik Manusia-Satwa Liar Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser

1. Konflik Manusia-Satwa Liar Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser

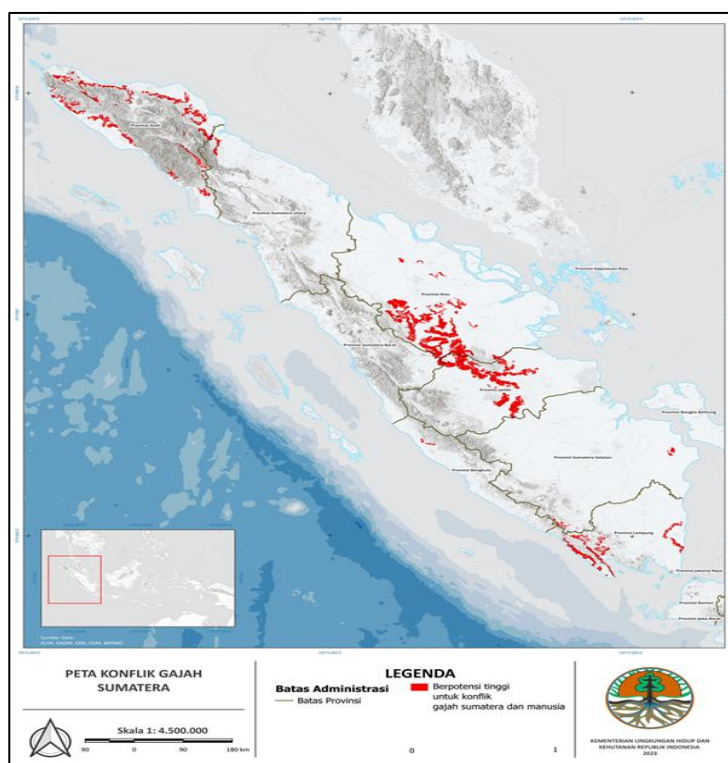
- a. Tanggapan KLHK (Strategi Penanganan Konflik Manusia dan Gajah Sumatera)
 - 1) Kebijakan Tingkat Nasional, Pengarusutamaan Pelestarian Kehati, terdiri dari:
 - Integrasi tata ruang, Memastikan seluruh kawasan berada di bawah perencanaan tata ruang yang terpadu, inklusif secara partisipatif, dan/atau pengelolaan efektif untuk meminimalisir hilangnya kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi;
 - Pengarusutamaan Kehati, Inisiasi dan terobosan dalam peraturan dan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 tentang

Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati kepada pengambil kebijakan lintas sektor;

- Perlindungan Satwa Liar, Perlindungan TSL dari aktivitas jerat dan perburuan liar di dalam dan luar kawasan hutan melalui Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2022;
- 2) Dukungan komitmen dari Pemerintah Aceh dalam pengelolaan dan penanganan konflik satwa liar dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah antara lain:
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar;
 - Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1521/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh No.522.51/1098/ 2015 ttg Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Aceh;
 - Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1519/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh No.522.51/1097/2015 ttg Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Aceh;
 - Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/1375/2020 ttg Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan, Satwa Liar Dilindungi di Aceh
- 3) Inpres 1/2023 Pengarusutamaan Pelestarian Kehati



- 4) Kantong Habitat Gajah Berdasarkan Fungsi Kawasan, Berdasarkan PHVA tahun 2016 : Populasi sekitar 1085-1605 individu, Total luasan habitat: 3,05 juta Ha, 32% berada di kawasan konservasi, 29% berada di kawasan hutan lindung, 21% berada di kawasan hutan produksi tetap, sisanya berada di HPK, Tubuh Air dan APL.
- 5) Peta Konflik Gajah Sumatera, Total luasan area konflik 1,75 juta Ha 57% berada di kawasan APL, 17% di kawasan hutan produksi tetap, 10% di kawasan hutan produksi terbatas, lainnya berada di HPK, HL, KK dan Tubuh Air.



6) Rekomendasi (Mitigasi Konflik Gajah)

- Ekologi

Early Warning System (GPS Collar, Camera Trap, trajectory monitoring), Barrier and Corridor Strategy (power Fencing, Canal, tanggul), Translokasi (persiapan releasing site), Mendorong habitat gajah menjadi Kawasan lindung di PBPH;

- Kelembagaan

Revitaliasi tim mitigasi/satgas Peningkatan kapasitas antar sektor, Produk hukum yang integratif, Inisiasi peta kawasan perlindungan gajah yang ditetapkan oleh SK Menteri LHK;

- Sosekbud

Alternatif livelihood (komoditi, ecotourism, peternakan, pertanian, dll), Membangun mekanisme kompensasi : Bagi masyarakat tapak dengan sistem voluntary, Bagi perusahaan dengan sistem umpan balik, Penguatan kembali kearifan lokal

7) Prinsip Penanganan Konflik Manusia Dan Satwa Liar

1. Manusia dan Satwa Liar Sama Sama Penting	• Secara bersamaan mempertimbangkan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita manusia yang didasari pertimbangan untuk kelestarian satwa
2. Site Spesific	• Solusi penanganan konflik berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lain
3. Tidak Ada Solusi Tunggal	• Merupakan rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial
4. Skala Landscape	• Upaya penanggulangan konflik harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya
5. Tanggung Jawab Multipihak	• Konflik mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah sehingga harus melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan untuk berbagi tanggung jawab

8) Upaya yang sudah dilakukan

- Pembentukan dan pelatihan masyarakat peduli konflik gajah (MPKG) sebanyak 13 kelompok di Pidie dan Pidie Jaya.
- Pemasangan GPS Collar sebanyak 21 unit (3 unit aktif saat ini di Aceh Timur).
- Pembangunan Barrier sepanjang 27.700 m (parit) dan 61.380 m (power fencing) di Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Selatan, Subulussalam.
- Patroli pencegahan konflik gajah.
- Patroli bersama masyarakat peduli konflik gajah.
- penanaman komoditi yang tidak disukai gajah namun bernilai ekonomi sebanyak 29.900 bibit (jeruk nipis, salak, akar wangi, jeruk lemon, lemon grass) di Aceh Jaya, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Pidie.
- Deliniasi koridor satwa liar di Aceh sebanyak 10 koridor satwa liar.

9) Strategi Penanganan Konflik Manusia – Gajah

Pendek	Lokus/Area/Wilayah
Memperkuat <i>emergency response</i> (respon cepat)* Sosialiasi dan penyadartahuan**	Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil
Menengah	Lokus/Area/Wilayah
Pemasangan <i>GPS Collar</i> Pembuatan barrier (<i>power fencing</i> /parit dan <i>bio-barrier</i>)	Aceh Barat, Pidie, Aceh Jaya, Bener Meriah Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Singkil
Panjang	Lokus/Area/Wilayah
Persiapan suaka gajah (areal preservasi) Translokasi Integrasi program oleh para pihak	Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Besar Kota Subulussalam, Aceh Tenggara Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil

*: unit/resor CRU, masyarakat peduli konflik, KPH, ranger
 **: kegiatan yang dilakukan pada Upaya jangka pendek, menengah dan panjang

10) Peran Para Pihak

NO	KEGIATAN	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Membentuk masyarakat peduli konflik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, BKSDA Aceh, BPBA/BPBD, KPH, mitra (swasta dan NGO/LSM)
2.	Patroli pencegahan konflik	BKSDA Aceh, KPH, MPKG, TNI, Polri, mitra (swasta dan NGO/LSM)
3.	Pendampingan masyarakat dan Penggiringan gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, BKSDA Aceh, BPBA/BPBD, KPH, mitra (swasta dan NGO/LSM)
4.	Sosialisasi dan penyadartahuan	BKSDA Aceh, DLHK Aceh, PUPR, KPH, BPBA/BPBD, mitra (swasta dan NGO/LSM), DPRA, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, KPH
5.	Pemasangan GPS Collar	BKSDA Aceh, FKH USK, dan mitra NGO/LSM
6.	Monitoring pergerakan gajah	BKSDA Aceh, KPH dan mitra NGO/LSM
7.	Pembangunan barrier 1. Power Fencing / Parit 2. Penyesuaian pilihan komoditi rendah risiko	BKSDA Aceh, DLHK Aceh, Bappeda Aceh, PUPR, KPH, BPBA/BPBD, mitra (swasta dan NGO/LSM), DPRA, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, KPH
8.	Perawatan power fencing/ parit	Pemda Kab/Kota
9.	Kajian lokasi suaka gajah/adopsi koridor hidupan liar pada revisi RTRWP	Bappeda, PUPR, DLHK Aceh, BKSDA Aceh, KPH, mitra NGO/LSM

11) Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Kabupaten untuk memetakan jalur satwa liar gajah dengan tujuan untuk mempertahankan areal hutan (Pemerintah akan menahan perizinan sertifikat penggunaan areal hutan). Disamping itu, Pemerintah Kabupaten juga perlu merencanakan lokalisir gajah di suatu area dengan tujuan pariwisata.

12) Upaya mitigasi untuk menghindari Konflik Satwa Liar Gajah dengan manusia secara teknis dan detail akan disampaikan oleh Kepala Balai KSDA Aceh, secara singkat :

a) Upaya mitigasi berikutnya:

- Penguatan patroli aktif dan pendampingan masyarakat, dengan melibatkan mitra, unsur TNI-Polri dan Masyarakat Desa Mandiri Konflik
- Pemasangan GPS Collar
- Lokalisir di daerah Batu Injin (terdapat uning/tempat penggaraman)
- Pengembangan wisata minat khusus (pengamatan gajah liar)

b) Terkait penanganan korban:

- Santunan dan bantuan kebutuhan bulanan.
- Anak korban pertama dijadikan staf volunteer, mulai aktif bulan agustus dengan honor bulanan Rp. 2 juta.

b. Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

- 1) Adanya konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar gajah disebabkan adanya alih fungsi yang bermula land clearing menjadi lahan sawit. Pemerintah Kabupaten telah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder dan bersepakat memetakan jalur satwa liar gajah dan memperkaya pakan gajah.
- 2) Permasalahan tersebut masih diperkirakan terjadi dalam waktu dekat dikarenakan satwa liar gajah diperkirakan akan turun kembali ke Kawasan permukiman warga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim yang bertugas selama 14 hari di lapangan guna memberikan informasi terkait dengan posisi pergerakan kelompok gajah kepada masyarakat.

c. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Masyarakat di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser perlu menyesuaikan pola hidup gajah dan perlu dipetakan jalur gajah;
- 2) Pemerintah perlu merubah fungsi dari Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menjadi wisata alam/wisata minat khusus sehingga masyarakat hutan juga mendapatkan dampak langsung terhadap pariwisata tersebut;

2. Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Aceh Tenggara

Pertemuan dengan Distributor dan kios pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Tenggara didasari oleh temuan dan keluhan petani yang menyatakan bahwa pupuk subsidi ditebus dengan harga Rp180 ribu-Rp250 ribu per sak (Harga HET pupuk subsidi ditetapkan pemerintah Rp2.250/kg atau Rp112.500 untuk 50 kg). Hal tersebut akan berdampak pada penurunan nilai tukar petani karena input produksi sudah mengalami kenaikan. Disamping itu juga ada sistem gandeng/paket yang diberlakukan oleh kios sehingga memaksa petani membeli dengan sistem paket. Temuan selanjutnya bersumber dari Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa telah menemukan 2 truk berisi pupuk subsidi yang dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara dan diduga ada oknum dari PT Pupuk Indonesia bekerjasama dalam menaikkan harga pupuk subsidi. Kenaikan harga pupuk bersubsidi menyebabkan nilai tukar petani semakin menurun karena input produksi mengalami kenaikan. Disamping itu, menurunnya daya beli petani terhadap pupuk subsidi diduga menyebabkan penyaluran ilegal ke perkebunan sawit disekitar. Hal tersebut sulit diselesaikan oleh pihak KP3 dan Pemerintah Daerah dikarenakan terindikasi keterlibatan dari pihak Pupuk Indonesia.

a. Tanggapan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

- 1) Harga pupuk subsidi lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan dan ketersediaan pupuk subsidi juga langka;
- 2) Pupuk urea bersubsidi dijual dengan harga Rp230.000 per sak; serta
- 3) Mendukung dicabutnya ijin distributor dan kios apabila ditemukan penyelewengan harga pupuk subsidi.

b. Tanggapan Distributor dan Kios

- 1) Tahun 2023, isu kelangkaan pupuk subsidi memang terjadi dikarenakan tidak bisa dimasukkan kembali ke RDKK dan alokasinya sangat kecil. Tahun 2024, alokasi di Kabupaten Aceh Tenggara cukup besar karena ada penambahan alokasi;
- 2) Jika harga pupuk subsidi di kios mencapai Rp140.000-Rp150.000 per sak, kemungkinan terjadi. Tetapi jika harga Rp180.000 hingga lebih dari Rp200.000 per sak maka tidak mungkin. Penyebab

kenaikan harga disebabkan oleh pungutan uang sumbangan dari oknum-oknum;

- 3) Perkebunan kelapa sawit masih tergolong sedikit dan rata-rata petani sawit juga menanam jagung;
- 4) Sistem pupuk gandeng juga dilakukan oleh kios;
- 5) Pemilik kios pupuk bersubsidi mengakui bahwa menjual pupuk bersubsidi berkisar Rp150 ribu per sak (50 kg) kepada petani yang seharusnya dijual sekitar Rp112.500 per sak (sesuai HET) kepada petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pupuk bersubsidi dijual diatas HET dikarenakan biaya yang dikeluarkan saat distribusi pupuk dari gudang hingga ke kios sangat tinggi.

c. Tanggapan Pemerintah Kabupaten dan KP3

- 1) Pemerintah Kabupaten dan KP3 telah melakukan sidak ke lapangan terkait dengan pupuk subsidi namun tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan izin distributor maupun kios pupuk subsidi. Berdasarkan hasil sidak di lapangan yang dihadiri oleh Kapolres dan Kajari, KP3 menemukan beberapa penyimpangan, diantaranya:
 - a) Hampir seluruh kios menjual pupuk subsidi diatas harga HET dengan rata-rata Rp150.000 per sak;
 - b) Banyak kios yang tidak mencantumkan harga HET di kios dan karung sementara dalam aturan wajib mencantumkan harga HET;
 - c) Gudang pupuk tidak sesuai dengan penempatannya atau ada yang tidak memiliki Gudang;
 - d) Tidak ada kios dan menjual barang kelontong; serta
 - e) Kios menjual sistem paket/gandeng dengan pupuk lainnya.
- 2) KP3 juga telah melakukan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kios pupuk. Adapun dalam pertemuan tersebut, tidak ditemukan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh Tenggara dan ditemukan permasalahan tingginya harga pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) . Distributor menjual pupuk bersubsidi kepada petani Rp150.000, sementara sesuai HET yaitu Rp112.000.

- 3) Pemerintah Kabupaten dan KP3 mengusulkan kepada PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pembinaan terhadap distributor dan kios yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kemudian KP3 juga akan melakukan evaluasi atas hasil temuan di lapangan
- d. Tanggapan PT Pupuk Indonesia
- 1) PT Pupuk Indonesia berkomitmen akan menambah sosialisasi kepada petani terkait dengan harga dan alokasi pupuk bersubsidi;
 - 2) Sudah 14 Tahun fee distributor dan kios tidak mengalami kenaikan;
 - 3) Permasalahan yang sering terjadi di wilayah pegunungan adalah biaya angkut yang ditanggung sangat terbatas (dari distributor ke kios). Oleh karena itu, PT Pupuk Indonesia akan berdiskusi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan biaya angkut dari distributor ke kios khususnya di daerah pegunungan. Disamping itu, PT Pupuk Indonesia memberikan solusi agar PT Pupuk Indonesia dapat mendistribusikan secara langsung pupuk subsidi di Kawasan pegunungan sehingga biaya tidak ditanggung oleh kios;
 - 4) PT Pupuk Indonesia akan mengevaluasi kinerja distributor pupuk subsidi di wilayah Aceh Tenggara. PT Pupuk Indonesia juga menghimbau kepada distributor dan kios pupuk agar mengikuti aturan dan tidak menjual pupuk subsidi diatas HET.
- e. Tanggapan Kapolres Kabupaten Aceh Tenggara dan Dandim 0108 Agara
- 1) Polres Kabupaten Aceh Tenggara dan Dandim 0108 Agara meminta distributor dan kios agar segera menginformasikan kepada Polres dan Dandim 0108 Agara apabila terdapat pungli dalam penyaluran pupuk subsidi.
- f. Tanggapan Kejari Kabupaten Aceh Tenggara
- 1) Kejari Kabupaten Aceh Tenggara telah menyelidiki kasus yang terjadi di distributor, kios pengecer, kelompok tani, dan pejabat Dinas Pertanian namun hingga saat ini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
- g. Tanggapan Kementerian Pertanian

- 1) Pupuk ditambah alokasinya bertujuan untuk peningkatan produksi;
 - 2) PT Pupuk Indonesia diharapkan memberikan sanksi kepada distributor dan kios yang melanggar aturan sesuai dengan perintah dari Menteri Pertanian;
 - 3) Diharapkan kios untuk ditempel daftar petani yang mendapatkan pupuk, HET pupuk diharapkan ditempel di kios-kios pupuk, dan dibutuhkan outline pengaduan; serta
 - 4) Sebagai solusi diharapkan kios dan distributor membuat pakta integritas terkait dengan pupuk subsidi.
- h. Tanggapan Komisi IV DPR RI
- a. Perlu ada ketegasan antara Produsen, distributor, dan kios terkait dengan penyimpangan harga serta penyimpangan penyaluran pupuk subsidi, dan diharapkan segera dicarikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut;
 - b. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia membuat roadmap konsumen pengguna pupuk subsidi guna menemukan temuan penyimpangan pupuk subsidi;
 - c. Sebelumnya Komisi IV DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian telah berkomitmen apabila ada distributor dan kios yang menaikkan harga pupuk subsidi, maka ijin dicabut. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI menghimbau distributor dan kios pupuk subsidi untuk tidak menaikkan harga pupuk subsidi di atas HET yang telah ditetapkan;
 - d. Komisi IV DPR RI menyarankan agar RDKK melibatkan babinkaptimnas dan babinsa. RDKK yang telah dibuat dominan copy paste. Disamping itu, juga terdapat distributor yang memiliki beberapa kios;
 - e. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten untuk mendampingi dalam penginputan data dalam E-RDKK sehingga update dan tepat sasaran;

- f. Terdapat aturan yang akan dibuat di Kementerian Perdagangan terkait dengan APBK yang bisa digunakan sebagai anggaran operasional KP3;
- g. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida untuk serius dalam mengatasi permasalahan pupuk subsidi khususnya terkait dengan tingginya harga pupuk subsidi (diatas Harga Eceran Tertinggi);
- h. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan hasil evaluasi bulan juli 2024 seluruh distributor khususnya distributor dan kios di Kabupaten Aceh Tenggara;
- i. Komisi IV DPR RI menghimbau distributor dan kios untuk melaporkan ke Kapolres dan Dandim apabila ada pungutan liar yang menyebabkan harga pupuk subsidi mengalami kenaikan;
- j. Komisi IV DPR RI sepakat agar PT Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan keuntungan/margin dan biaya/fee distribusi sehingga kios dan distributor tidak menjual diatas HET; serta
- k. Komisi IV DPR RI akan melakukan evaluasi dengan PT Pupuk Indonesia terkait dengan keluhan masyarakat atas harga pupuk yang jauh melampaui HET.

D. Panen Raya Jagung di Kecamatan Babul Makmur

Budi daya jagung di Kabupaten Aceh Tenggara sudah dimulai sejak Tahun 1996 dan animo masyarakat semakin meningkat hingga Tahun 2010 melalui berbagai program yang didukung oleh Pemerintah sehingga penanaman jagung merata ke seluruh jenis lahan (lahan datar hingga berbukit baik dalam bentuk penanaman monokultural maupun tumpang sari/tumpang sisip). Kemudian Aceh Tenggara menjadi wilayah sentral komoditas jagung terbesar di Provinsi Aceh dengan total produksi di Tahun 2023 mencapai 166.689 ton dari luas panen 24.037 Ha setara dengan produktivitas 7 ton per Ha dan melibatkan petani mencapai 30 ribu orang. Saat ini jumlah standing crop tanaman jagung di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 1.018 Ha dan terdapat 700 Ha lebih yang akan dipanen dalam waktu dekat.

Produksi jagung Kabupaten Aceh Tenggara hingga saat ini masih dijual sebagai jagung pipilan kering ke Provinsi Sumatera Utara, terutama sebagai bahan baku pakan ternak di beberapa pabrik pengolahan pakan ternak seperti PT Charoen Pokphand. Selanjutnya pakan jagung pecah tiga, pecah empat, dan pellet dibeli oleh peternak dan pelaku usaha kolam ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara termasuk kedalam sentra perikanan air tawar terutama ikan mas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten berharap agar pengolahan pakan ternak dapat tersedia di Kabupaten Aceh Tenggara sehingga dapat menjual pakan jagung ke beberapa peternakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait dengan harapan diadakan pabrik pengolahan pakan ternak di Kabupaten Aceh Tenggara.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten berharap dukungan kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait dengan usulan program hilirisasi komoditas jagung di Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki keunggulan dalam hal produksi jagung. Pertanaman jagung yang mudah untuk ditanam dan diproduksi. Hal tersebut sangat mendukung program hilirisasi industri jagung yang membutuhkan bahan baku yang tersedia secara kontinu. Namun, tingginya animo masyarakat dalam menanam jagung, juga terdapat permasalahan yaitu:

1. Kondisi masyarakat terlalu *Brand Oriented* sehingga hanya menggunakan satu jenis merk dagang jagung yang diyakini dapat memberikan hasil tinggi di Kabupaten Aceh Tenggara. Pemerintah Kabupaten mengalami kesulitan dikarenakan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat berbeda dengan benih jagung yang sudah sering digunakan oleh petani;
 2. Dalam 5 tahun terakhir, serangan hama dan penyakit pada tanaman jagung meningkat sehingga petani harus menggunakan pestisida untuk meminimalisir kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit; dan
 3. Ketersediaan benih merk tertentu cukup mahal dan sulit didapatkan.
1. Tanggapan Kementerian Pertanian
 - a. Kementerian Pertanian mendukung petani agar melakukan percepatan masa tanam (dengan jarak panen dan tanam selama 14 hari) dan meningkatkan produksi tanaman jagung;

- b. Kementerian Pertanian meminta kepada petani untuk memanfaatkan bantuan pompa yang diberikan guna mendukung percepatan tanam;
 - c. Daerah yang tidak dapat digunakan untuk menanam padi, diharapkan dimanfaatkan untuk menanam jagung seluas 24 ribu Ha. Apabila ingin memperluas areal tanam dapat memanfaatkan bukit dan lereng gunung;
 - d. Kementerian Pertanian meminta Kadis Pertanian untuk melakukan pendataan kembali dikarenakan CPCL yang diajukan hanya 5000 Ha;
 - e. Kementerian Pertanian meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dan penyuluh untuk meningkatkan produksi jagung dan diharapkan petani mendapatkan harga jual yang sesuai; dan
 - f. Kementerian Pertanian juga akan menindaklanjuti permasalahan pupuk bersubsidi sehingga petani mendapatkan harga pupuk bersubsidi yang sesuai.
2. Tanggapan Komisi IV DPR RI
- a. Komisi IV DPR RI berkomitmen dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten agar pupuk subsidi yang dijual oleh kios tidak lebih dari HET dan diharapkan petani melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten apabila kios menjual lebih dari HET;
 - b. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian untuk tetap mengawal kestabilan harga pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q Ditjen Tanaman Pangan untuk menyediakan pupuk dan bibit unggul dengan target tanam pada lahan 10 ribu Ha dan menjaga kestabilan harga jual hasil panen tanaman jagung;
 - d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten agar memperhatikan kesejahteraan penyuluh pertanian;
 - e. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas dan Perum Bulog untuk dapat menyerap jagung petani Kabupaten Aceh Tenggara;
 - f. Komisi IV DPR RI meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menyediakan pabrik jagung di Kabupaten Aceh Tenggara;

- g. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pemberian bantuan benih jagung berdasarkan jenis yang digunakan oleh petani;
- h. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera menyalurkan bantuan benih jagung yang dibutuhkan oleh petani;
- i. Komisi IV DPR RI akan mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan asuransi usaha tani di Kabupaten Aceh Tenggara;
- j. Terkait dengan hilirisasi jagung, Komisi IV DPR RI akan mengkoordinasikan dengan asosiasi ternak dan pakan jagung. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten diharapkan melakukan koordinasi dengan pabrik pakan jagung di Provinsi sekitar; serta
- k. HAP (Harga Acuan Pemerintah) komoditas jagung Rp 5000 diharapkan dirasakan oleh petani dengan kadar air 14%. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas dan Perum Bulog untuk mendukung penyerapan jagung di Kabupaten Aceh Tenggara.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Pusat c.q. Kementerian KP untuk membantu kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Aceh Tenggara berupa ; sarana prasarana produksi, pakan yang terjangkau baik dari segi harga dan pasokan, peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan, indukan dan benih unggul, serta pemasaran.
2. Komisi IV DPR RI berpendapat bahwa menjaga kelestarian hutan merupakan tanggungjawab bersama karena eksploitasi hutan yang tidak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Komisi IV DPR RI menghimbau dalam menjaga kelestarian hutan khususnya Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dengan memberikan pemahaman terkait dengan lingkungan hutan. Disamping itu, perlu ada dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perlindungan hutan.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah Pusat c.q. Kementerian LHK agar mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati di Kabupaten Aceh Tenggara. Disamping itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada KLHK untuk membuat FGD terkait dengan peta jalan pelestarian

Taman Nasional Gunung Leuser yang didalamnya memuat proses pengamanan dan pemanfaatan gunung Leuser dengan lebih baik.

4. Komisi IV DPR RI sepakat dengan KLHK untuk melakukan dan menyusun program pengamanan dan perlindungan Gunung Leuser secara optimal
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk fokus dalam memberikan pendanaan konservasi kepada masyarakat di wilayah Kawasan Hutan.
6. Komisi IV DPR RI meminta meminta Pemerintah Pusat cq. KLHK untuk memetakan jalur satwa liar gajah dengan tujuan untuk mempertahankan areal hutan (Pemerintah akan menahan perizinan sertifikat penggunaan areal hutan). Disamping itu, KLHK bersama Pemerintah daerah perlu merencanakan lokalisasi gajah di suatu area dengan tujuan pariwisata.
7. Komisi IV DPR RI meminta meminta Pemerintah Pusat cq. KLHK dalam upaya mitigasi untuk menghindari konflik gajah dengan manusia perlu dilakukan dengan perencanaan yang komprehensif, terintegrasi dan berkeadilan serta prinsip kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.
8. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan hasil evaluasi bulan juli 2024 seluruh distributor khususnya distributor dan kios di Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Komisi IV DPR RI sepakat agar PT Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan keuntungan/margin dan biaya/fee distribusi sehingga kios dan distributor tidak menjual diatas HET;
10. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian untuk tetap mengawal kestabilan harga pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q Ditjen Tanaman Pangan untuk menyediakan pupuk dan bibit unggul dengan target tanam pada lahan 10 ribu Ha dan menjaga kestabilan harga jual hasil panen tanaman jagung;
12. Komisi IV DPR RI akan mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan asuransi usaha tani di Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Komisi IV DPR RI meminta Bapanas dan Perum Bulog untuk mendukung penyerapan jagung di Kabupaten Aceh Tenggara.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh pada Masa Persidangan V Tahun 2023-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada mitra kerja Komisi IV DPR RI untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan akan dibawa dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Diharapkan, Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

Jakarta, Juli 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Budhy Setiawan
A-290

MITRA PENDAMPING

Kementerian LHK

1. **IR. DYAH MURTININGSIH M.HUM. (DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN);**
2. **Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum.** (Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
3. **Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut. MBA.** (Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. **Rinaldo, S.Hut.T, M.Si.** (Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser);
5. **Ujang Wisnu Barata, S.Hut., M.Sc., M.Si.** (Kepala Balai KSDA Aceh);
6. **Hari Novianto, S.Sos., M.H.** (Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera);
7. **Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Sc.** (Kepala BPDAS Wampu Sei Ular).

Kementerian KP

1. **DR. TB. HAERU RAHAYU, A.PI. M.SC (DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA);**
2. **Ir. Nono Hartanto, M.Aq.** (Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Budidaya)

Kementerian Pertanian

1. **DR. IR. SUWANDI, M.SI. (DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN);**
2. **Ir. Yuliana Kansrini, M.Si** (Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan)
3. **Firdaus, SP, M.Si** (Kepala BPSIP Aceh)

Badan Pangan Nasional

1. **DR. NYOTO SUWIGNYO, M.M. (DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI);**

Perum Bulog

1. **BAGYA MULYANTO (DIREKTUR KEUANGAN);**
2. **Saldi Adrin** (Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh);

PT Pupuk Indonesia

1. **RAHMAD PRIBADI (DIREKTUR UTAMA PT PI);**
2. **BUDI SANTOSO SYARIF (DIREKTUR UTAMA PT PIM);**
3. **Iyan Fajri - SVP Pemasaran**

4. **Yehezkiel Adiperwira** - VP Strategic Delivery Unit
5. **Maranatha Bernard** - VP Hubungan Lembaga
6. **Wawan Arjuna** - SM Sumatera Bagian Utara
7. **David Marchio Purba** - Executive Assisstant
8. **Aswin Anshari** - Manager Penjualan Aceh
9. **Rijalul Fickri** - Manager Pergudangan Sumbagut
10. **Aditya Firdaus** - AE Aceh Tenggara
11. **Maimun Zakaria** - Sekretaris Perusahaan
12. **Yusra** - SVP Umum
13. **Athailah** - PM Agrosolution

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Balai Benih Ikan Lawe Bekung Kabupaten Aceh Tenggara



Stasiun Penelitian BBTNGL





Diskusi mengenai pupuk bersubsidi dan penanganan konflik manusia-satwa liar gajah



Panen Raya Jagung



LIPUTAN MEDIA

Reses Komisi IV Ke Aceh Tenggara, Bakal Tinjau Taman Nasional Gunung Leuser

PARLEMENTARIA, Aceh Tenggara - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan dan rombongan tiba di Pendopo Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) Provinsi Aceh Senin sore setelah melalui perjalanan darat selama 8 jam dari Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara (15/7/2024).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan, Kunjungan Kerja Reses kali ini memiliki sejumlah agenda kegiatan antara lain pada Selasa (16/7) peninjauan dan diskusi terkait perkembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Lawe Bekung. Setelah itu meninjau dan diskusi mengenai strategi konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser, dilanjutkan pertemuan di operasional room Setdakab, diskusi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi.

"Pada hari berikutnya, Rabu kita akan meninjau mengenai penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser, dan dilanjutkan

langsung menuju lokasi Panen Raya Jagung di Kecamatan Babul Makmur," ungkap Legislator asal Dapil Jawa Barat III ini.

Politisi Partai Golkar ini berharap kunjungan reses Anggota Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Aceh Tenggara dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertanian, pangan, kelautan, dan kehutanan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi IV DPR RI, sebutnya.

Kedatangan Tim dari Komisi IV DPR RI disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agara Yusrizal mewakili Pj Bupati Agara, Syakir, Forkopimda serta sejumlah pejabat Aceh Tenggara lainnya di Pendopo Bupati. Seusai berbincang-bincang bersama Forkopimda, Tim Komisi IV langsung menuju kediaman HM Salim Fakhry sekaligus ramah tamah dan makan malam bersama.

Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh dipimpin Ketua Tim, Budhy Setiawan (F-Partai Golkar), didampingi Anggota Komisi IV antara lain: Djarot Saiful Hidayat (F-PDIP), Salim Fakhry (F-Partai Golkar), Alien Mus (F-Partai Golkar), Endro Harmoni (F-Partai Gerindra), H. Muhtarom (F-PKB), Edward Tanur (F-PKB), H. Selamat (F-PKS), Hermanto (F-PKS), dan KH Asep A. Maoshul Affandy (F-PPP). (oji/aha)

Sumber: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50549/t/Reses+Komisi+IV+Ke+Aceh+Tenggara%2C+Bakal+Tinjau+Taman+Nasional+Gunung+Leuser>

Sumber lainnya:

1. <https://waspada.co.id/10-anggota-dpr-ri-tiba-di-aceh-tenggara-berikut-jadwal-kunjungannya/>
2. <https://www.waspada.id/aceh/komisi-iv-dpr-ri-reses-ke-aceh-tenggara/>
3. <https://www.waspada.id/aceh/hm-salim-fakhry-jamu-anggota-komisi-iv-dpr-ri-dan-dirjen-kementerian/>
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50577/t/Komisi%20IV%20Bersama%20KKP%20Bagikan%20Benih%20Ikan%20Mas%20di%20Aceh%20Tenggara>
5. <https://www.rri.co.id/daerah/831286/dirjen-perikanan-ri-haeru-bagi-benih-ikan-di-agara>
6. <https://agaranews.com/dandim-dan-pasiter-hadiri-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-dan-kementerian-kelautan-dan-perikanan/>
7. https://antaranews.com/anggota-dpr-ri-serahkan-bantuan-benih-pada-kelompok-tani-di-agara/#google_vignette

8. <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/publikasi/foto-kegiatan-detail/npD.html>
9. <https://www.waspada.id/aceh/10-poktan-terima-bibit-ikan-mas-ini-pesan-ketua-komisi-iv-dpr/>
10. <https://badanpangan.go.id/blog/post/kunjungi-balai-benih-ikan-di-aceh-tenggara-nfa-mendukung-pengembangan-budidaya-ikan-air-tawar-sebagai-sumber-protein-hewani>
11. https://www.nanggroe.media/news/direktur-kkp-kami-terus-mendukung-pengembangan-budidaya-ikan-air-tawar-di-aceh-tenggara/#google_vignette
12. https://dialeksis.com/parlemenkita/kunker-ke-tngl-komisi-iv-dpr-ri-masyarakat-sejahtera-hutan-terjaga/#google_vignette
13. <https://dialeksis.com/parlemenkita/kunker-ke-tngl-komisi-iv-dpr-ri-masyarakat-sejahtera-hutan-terjaga/>
14. <https://www.noa.co.id/muhtarom-masyarakat-sejahtera-hutan-terjaga/>
15. <https://www.kba.one/news/komisi-iv-dpr-ri-tinjau-konservasi-tngl-dan-pertanian-masyarakat/index.html>
16. <https://www.waspada.id/aceh/komisi-iv-dpr-ri-jangan-coba-coba-naikkan-het-pupuk-subsidi/>
17. <https://waspada.co.id/kanker-dan-reses-komisi-iv-dpr-ri-di-aceh-tenggara-tuntaskan-persoalan-harga-pupuk-subsidi/>
18. <https://lenteratoday.com/komisi-iv-dpr-ri-minta-pemerintah-serius-atasi-persoalan-pupuk-subsidi/>
19. <https://www.habaaceh.id/news/kppp-temukan-adanya-penjual-kelontong-menjual-pupuk-bersubsidi-di-agara/index.html>
20. <https://sawitindonesia.com/anggota-komisi-iv-dpr-ri-m-salim-fakhry-mendesak-pemkab-mengatasi-persoalan-pupuk-subsidi/>
21. <https://www.kba.one/news/komisi-iv-dpr-ri-bongkar-dugaan-kongkalikong-harga-pupuk-subsidi-di-agara/index.html>
22. https://www.bithe.co/news/alasan-distributor-jual-pupuk-bersubsidi-di-atas-het-banyak-oknum-minta-bantuan/index.html#google_vignette
23. <https://fanews.id/kppp-temukan-adanya-penjual-kelontong-menjual-pupuk-bersubsidi-di-agara/>
24. <https://aceh.tribunnews.com/2024/07/19/distributor-diminta-tak-mainkan-harga-pupuk>
25. <https://www.rri.co.id/umkm/832582/aceh-tenggara-panen-roya-jagung>
26. <https://waspada.co.id/pemkab-dan-komisi-iv-dpr-ri-gelar-panen-roya-jagung-di-agara/>
27. <https://www.kba.one/news/komisi-iv-dpr-ri-panen-roya-jagung-di-agara/index.html>